

BAB III

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

TERHADAP PENANGANAN FAKIR MISKIN DILIHAT DARI REALITA

SAAT INI

A. Perihal Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Bandung Terhadap Penanganan Fakir Miskin.

Pemerintah Kota Bandung saat ini telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi permasalahan yang ada pada masyarakat khususnya mengenai kemiskinan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung sejauh ini adalah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tertulis dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial yang tentunya harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penangan Fakir Miskin. Namun pada kenyataannya, angka kemiskinan di kota Bandung masih tetap tinggi, bahkan warga yang tergolong fakir miskin masih banyak terdapat di pusat kota Bandung.

Permasalahan Pemerintah kota Bandung saat ini menghadapi gejala-gejala kemiskinan yang cukup sulit untuk diatasi. Bapak Drs. Dwi Markoniandi Sutisna, M.Pd, selaku Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan Dinas Sosial Kota Bandung mengatakan bahwa masyarakat yang tergolong miskin saat ini sudah terbiasa menunggu diberi bantuan dari Pemerintah. Sudah tidak ada lagi keinginan yang

kuat untuk mengembangkan potensi yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun banyak program dan proyek yang berusaha menanggulangi kemiskinan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, namun belum juga membuahkan hasil yang diharapkan. Program-program yang diberikan pemerintah diantaranya:

1. KIS (Kartu Indonesia Sehat)

Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah kartu yang memiliki fungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Penggunaannya sendiri dapat menggunakan fungsi KIS ini di setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut. Kartu ini sendiri merupakan program yang bertujuan untuk melakukan perluasan dari program kesehatan yang sebelumnya yaitu BPJS Kesehatan yang telah diluncurkan oleh mantan presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) pada tanggal 1 Maret 2014 kemarin.

Prosedur pelayanannya, KIS memiliki prinsip yang sama dengan jaminan kesehatan lainnya seperti juga BPJS. Prosedurnya, setiap pemilik KIS harus terlebih dahulu mendatangi puskesmas sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk melakukan pemeriksaan tahap awal. Jika kondisi penyakitnya memang harus mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut, maka puskesmas akan memberikan surat rujukan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lanjutan yaitu rumah sakit daerah. Namun peraturan ini tidak berlaku

jika pemilik KIS sedang dalam keadaan darurat. Jika hal ini terjadi maka peserta bisa langsung mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.

Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

2. PKH (Program Keluarga Harapan)

Program Keluarga Harapan (PKH) bukanlah program baru, program ini sudah ada di negara lain yang dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* yang diterjemahkan menjadi bantuan tunai bersyarat. Sebagai program untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial. Indonesia mulai menerapkan PKH sejak tahun 2007 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

PKH menjadi salah satu bagian strategi penanggulangan kemiskinan dengan memberi bantuan dana tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), dengan catatan mereka harus bersedia mematuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan. Hal ini terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya bidang kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan sosial. Sasaran atau penerimaan bantuan ini adalah RSTM yang memiliki anggota keluarga berusia 0-6 tahun, anak berusia

7-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun, ibu hamil dan nifas, penyandang disabilitas berat serta lansia miskin.

PKH merupakan bantuan dana tunai bersyarat pertama di Indonesia. Program perlindungan sosial ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga sangat miskin dengan syarat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu yang telah ditetapkan bagi keluarga sangat miskin. Dengan pemberian akses, diharapkan terjadi perubahan perilaku yang mendukung tercapainya kesejahteraan sosial.

3. (BPNT) Bantuan pangan non tunai

Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui Mekanisme akun Elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warung KUBE PKH/pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Bank Himbara.

Bantuan Pangan Non Tunai Bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu. Namun rupanya pendekatan itu masih belum jitu menangani kemiskinan yang begitu kompleks.

B. Realita Keadaan Warga Fakir Miskin

Kota Bandung merupakan Ibu kota Jawa Barat yang dikategorikan daerah padat penduduk. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung

dengan luas wilayah sekitar 16.730 ha, maka kepadatan penduduk kota Bandung pada tahun 2018 tercatat mencapai 2,5 juta jiwa.²⁵⁾

Keadaan penduduk di kota Bandung yang begitu padat, menjadikan persaingan kerja yang semakin ketat. Sehingga banyak warga kota Bandung yang kehilangan pekerjaan atau kehilangan mata pencahariannya untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Akibat dari kehilangan pekerjaan atau kehilangan mata pencahariannya warga kota Bandung banyak mengalami penurunan perekonomian dan pendapatan. Berdasarkan BDT (Basis Data Terpadu) warga fakir miskin di kota Bandung saat ini mencapai 138.000 KK. Yaitu 40% dari jumlah penduduk Kota Bandung. Yang dapat dikategorikan sebagai fakir miskin terbagi menjadi 4 golongan yaitu:

- A. hampir miskin 10%,
- B. rentan miskin 10%,
- C. miskin 5%, dan
- D. sangat miskin 15%.

Table 1.1
Jumlah penduduk dan penduduk miskin di Kota Bandung

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk miskin
1	2014	2.470.802	115.000
2	2015	2.481.469	114.120
3	2016	2.490.622	107.580

Sumber: Kota Bandung dalam angka 2014 - 2016 (BPS)²⁶⁾

²⁵<http://data.bandung.go.id/group/302e85d5-c8e0-49fd-9dd3-59246108b1c5?organization=dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil> di akses pada tanggal 1 Juni 2018

Berdasarkan tabel yang telah diuraikan dapat diketahui dari tahun ke tahun di kota Bandung angka kemiskinan semakin berkurang walaupun jumlah penduduk semakin bertambah, hal tersebut tak lepas dari campur tangan pemerintah dalam merancang suatu kebijakan yang tepat terhadap masyarakatnya. Akan tetapi pada tahun 2018 angka kemiskinan di kota Bandung kembali bertambah, berdasarkan Basis Data Terpadu dari Dinas Sosial Kota Bandung.

Tabel 1.2
Jumlah Kartu Keluarga Miskin di Kota Bandung

No	Tahun	Data Fakir Miskin (Kartu Keluarga)
1	2017	130.832 Kartu Keluarga
2	2018	137.811 Kartu Keluarga

Sumber: BDT (Basis Data Terpadu) Dinas Sosial dan Penanggulangan Fakir Miskin Kota Bandung 2018.

Meningkatnya angka kemiskinan pada tahun ini disebabkan kurangnya pengawasan dan pendampingan terhadap penanganan fakir miskin sehingga banyak bantuan-bantuan dari pemerintah yang tidak tepat sasaran pada warga fakir miskin. Berikut adalah data jumlah Kartu Keluarga miskin terbanyak berdasarkan beberapa wilayah/kecamatan dan rata-rata pekerjaannya Tahun 2018:

Tabel 1.3
Jumlah Kartu Keluarga miskin perwilayah dan pekerjaannya

Wilayah/Kecamatan	Jumlah Kartu Keluarga Miskin	Rata-Rata Pekerjaan

²⁶<https://bandungkota.bps.go.id>, diakses pada hari Selasa, 19 Juni 2018.

Bojongloa Kaler	11371	Pekerja Serabutan/Dagang
Babakan Ciparay	9757	Pekerja Buruh/Dagang
Batununggal	8624	Pekerja Buruh/Dagang
Cibeunying Kidul	6019	Pekerja Buruh
Sukajadi	5471	Pekerja Buruh
Regol	4183	Pedagang

Sumber: BDT (Basis Data Terpadu) Dinas Sosial dan Penanggulangan Fakir Miskin Kota Bandung 2018.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti mengambil contoh kasus yang menarik yaitu keluarga fakir miskin terlantar yang bertempat tinggal di ruangan bekas pos satpam diseberang kantor Dinas Sosial Kota Bandung dan nasib warga fakir miskin terlantar di pusat kota Bandung dan sekitarnya.

1. Keluarga fakir miskin terlantar di dekat kantor Dinas Sosial Kota Bandung:

Keluarga Ibu Yayah dan Bapak Didi Kardian yang terlantar. Ibu Yayah yang ber usia (53) tahun bersama dua anaknya, Ade Yadi yang ber usia (28) tahun dan Sandi Febriyana yang ber usia (17) tahun tinggal di bekas pos satpam berukuran sekitar 1x2 meter di Jalan Cipedes Tengah, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Sang bapak, Didi Kardian yang ber usia (52) menumpang di kios yang ada di depan pos satpam, sedangkan tiga anak lainnya berpindah-pindah menumpang di rumah orang lain. Ironisnya, pos satpam yang mereka huni tidak sampai berjarak 300 meter dari kantor

Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung di Jalan Sindang Sirna. Saat ditemui, Ibu Yayah bersama Ade tengah tiduran di dalam pos, karena keduanya tak bisa banyak beraktivitas. Sudah setengah tahun ini Yayah menderita stroke dan kesulitan berjalan, sedangkan Ade susah berjalan karena kaki kirinya sudah dua kali patah. Ibu Yayah menuturkan, kesulitan ekonomi yang dialami keluarganya terjadi sejak dirinya mengalami stroke. Sebelumnya, dia biasa bekerja menjadi pembantu rumah tangga, sehingga mampu membiayai kontrakan rumah dan kebutuhan sehari-hari. Yayah tak bisa banyak berharap dari penghasilan suaminya, karena suaminya hanya bekerja sebagai sopir tembak. Apalagi, suaminya menderita hernia yang mengharuskan dioperasi. "Sekarang sudah dioperasi, tapi sakit bekas operasi hernia itu masih suka terasa sewaktu kerja. Kerjanya juga enggak tentu, karena cuma jadi sopir tembak. Kalau habis kerja, bapak suka bawa pulang uang Rp 15-20 ribu, tapi itu juga enggak setiap hari, kalau lagi ada kerjaan saja. Karena di sini tidak muat, dulu bapak suka tidur di masjid, tapi sekarang dibolehkan menumpang di kios depan." Lima orang anaknya saat ini hanya Sandi yang masih sekolah di SMA PGRI 1 Bandung. Anak yang bungsu, Faisal Mail ber usia (13) tahun yang baru kelas 6 SD terpaksa putus sekolah karena kesulitan biaya. Tiga anak lainnya, Ade berikut Aldi Ramdan ber usia (23) tahun dan Diana ber usia (19) tahun juga tidak bisa leluasa mencari kerja karena mereka tidak mengenyam pendidikan tingkat SMA/ sederajat. "Aldi tinggal di Sarijadi, menumpang di rumah

temannya. Terakhir dia kerja jadi kuli angkut sampah. Diana juga menumpang di rumah temannya, di Cipedes daerah atas. Dia kerja di toko, tapi sudah berhenti, enggak tahu sekarang bagaimana. Kalau Ade sama Sandi suka markirin di minimarket depan. Itu juga Ade markirinya kalau lagi sepi, karena kalau macet justru khawatir kenapa-kenapa, karena jalannya saja susah," kata Ibu Yayah.

Kebijakan mengenai penanggulangan kemiskinan terus dilakukan pemerintah Kota Bandung. Banyak program yang telah dikeluarkan dan terus mengalami perubahan, akan tetapi belum dapat mengurangi angka kemiskinan yang signifikan. Program – program yang telah dikeluarkan dan mengalami perubahan itu khususnya program yang ditujukan untuk individu dan keluarga yang belum mampu memaksimalkan potensi atau memang individu yang sudah tidak produktif seperti lansia dan cacat total, akan tetapi realita dilapangan masih banyak bantuan-bantuan dari pemerintah yang tidak tepat sasaran pada warga fakir miskin yang dituju disebabkan belum sinkronnya data-data warga fakir miskin secara menyeluruh. Hal ini menjadi permasalahan yang cukup sulit dihadapi oleh pemerintah kota Bandung untuk menangani fakir miskin.

Struktur kehidupan bernegara, unit pertama yang dapat membentuk karakter seorang individu ialah keluarga. Keluarga menjadi lingkungan pertama yang dapat menentukan perilaku seseorang. Dapat dikatakan bahwa keluarga merupakan ajang pertama dalam

membentuk konsep masyarakat sejahtera.²⁷⁾ Banyak keluarga yang belum menyadari bahwa lingkungan sosial dengan keluarga merupakan elemen yang saling terkait. Sehingga keluarga berada di tengah-tengah lingkungan sosial yang kemudian dipandang melalui banyak perspektif. Salah satu perspektif menganggap keluarga yang tidak mampu memaksimalkan fungsinya sehingga pada akhirnya dianggap sebagai pemecah masalah dalam kehidupan bernegara. Kondisi keluarga atau orang tua yang telah mapan tentu akan membawa keturunan atau anak dalam kondisi berkecukupan. Namun sebaliknya, jika keluarga atau orang tua tidak mampu menyelesaikan masalah yang ada, maka akan turun kepada anaknya sehingga terjadi rantai kemiskinan.

2. Warga fakir miskin yang hidup sendiri tanpa anak, istri dan keluarganya:

Pak Udan salah satu warga fakir miskin terlantar di daerah jalan Ancol Kecamatan Cikawao yang hidup hanya sendiri tanpa anak dan istri serta keluarganya. Ia berusia kurang lebih 50 tahun dan bertempat tinggal di salah satu kamar kosan. Ia tidak menerima bantuan apa pun dari program-program yang telah diterapkan oleh pemerintah bahkan kurang diperhatikan oleh pemerintah khususnya RT dan RW setempat. Pak Udan bekerja serabutan, terkadang ia bekerja sebagai kuli, bersih-bersih kosan dan mengecat rumah warga yang upahnya dibawah Rp. 200.000/bulan. Meskipun daerah jalan Ancol yang berada dekat

²⁷⁾ Azumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisional dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Logos, Jakarta, 1999, hlm. 3

dengan pusat kota, akan tetapi tidak dapat mencuri perhatian lebih dari pemerintah untuk membantu dan memberdayakan fakir miskin di daerah tersebut.

Pusat Kota, jalan asia-afrika tepatnya disekitaran gedung merdeka menjadi lahan masyarakat miskin untuk menikmati kehidupannya. Selain tempatnya yang luas, pusat kota juga memiliki keindahan-keindahan bangunannya yang megah, sehingga menarik minat banyak orang untuk menikmati keindahannya itu dengan cara berfoto bersama keluarga atau pun sahabat. Mulai dari kalangan menengah kebawah sampai kalangan menengah keatas warga Bandung maupun masyarakat dari luar kota bahkan luar negeri kerap berkunjung ke pusat kota untuk menikmati keindahan suasana kota Bandung.

Miris sekali rasanya melihat banyak masyarakat miskin yang menjalani kehidupannya dijalanan. Walaupun pusat kota memiliki bangunan-bangunan yang indah akan tetapi tidak sebanding dengan melihat banyaknya masyarakat miskin yang masih terlantar. Mulai dari anak terlantar, pengamen, pemulung, gelandangan, bahkan orang gila masih banyak terdapat di pusat kota Bandung.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS TENTANG EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TERHADAP FAKIR MISKIN

A. Penerapan Kebijakan Pemerintah Kota Bandung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Kebijakan publik dianggap peneliti sangat terkait dengan pendekatan kesejahteraan sosial ketika *public actor* menganalisis *problem* dan mengimplementasikan seluruh kegiatan sehubungan dengan tugas, sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik. Wujud konkrit dari kebijakan adalah keluaran berupa program yang bersifat lebih operasional. Kebijakan merupakan suatu usaha pengambilan keputusan yang pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mendapat informasi, mengolahnya dan akhirnya membuat keputusan yang dianggap terbaik melalui program-program yang ditawarkan. Penerapan kebijakan Pemerintah Kota Bandung terhadap penanganan fakir miskin yang tengah dilaksanakan saat ini yaitu berupa program-program bantuan dengan cara memberikan pembinaan yang bertujuan agar fakir miskin di kota Bandung dapat hidup secara layak. Masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan hidup dalam keadaan yang tidak selayaknya. Jika hal ini terus dianggap biasa kemungkinan besar nasib masa depan Indonesia dalam jurang yang berbahaya. Sekitar

32,5 juta penduduk Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan, ada sekitar setengah dari seluruh rumah tangga tetap berada di garis kemiskinan nasional (Rp. 200.262/bulan). Standar tersebut diambil dari Bank Dunia yang menetapkan bahwa kondisi seseorang dianggap di bawah garis kemiskinan jika ia memiliki pendapatan kurang dari \$2 perhari, serta banyak faktor yang memengaruhi kondisi kemiskinan yang berdampak pada kesenjangan. Rusaknya ekonomi pasar, pendidikan yang tidak dapat dijangkau, pelayanan kesehatan yang sukar untuk diakses, kurangnya lapangan pekerjaan dan tingkat ketimpangan aset yang disebabkan karena keputusan politik. Berdasarkan data yang telah diuraikan dalam bab III, pada tahun 2018 kota Bandung dengan luas wilayah sekitar 16.730 ha, maka kepadatan penduduk kota Bandung tercatat mencapai 2,5 juta jiwa. Keadaan penduduk di kota Bandung yang begitu padat, menjadikan persaingan kerja yang semakin ketat. Sehingga banyak warga kota Bandung yang kehilangan pekerjaan atau kehilangan mata pencahariannya untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Akibat dari kehilangan pekerjaan atau kehilangan mata pencahariannya warga kota Bandung banyak mengalami penurunan perekonomian dan pendapatan. Warga fakir miskin di kota Bandung saat ini mencapai 138.000 KK. Yaitu 40% dari jumlah penduduk Kota Bandung. Yang dapat dikategorikan sebagai fakir miskin terbagi menjadi 4 golongan yaitu:

A. hampir miskin 10%,

- B. rentan miskin 10%,
- C. miskin 5%, dan
- D. sangat miskin 15%.

Program-program yang telah berjalan cukup lama seperti BLT, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan beras yang diperuntukkan orang miskin (Raskin), KIS, PKH, dan beberapa bantuan lainnya belum dapat mengurangi angka kemiskinan yang signifikan di Kota Bandung. Perlu adanya program-program yang lebih terarah, terpadu, berkelanjutan serta adanya pendampingan dan pengawasan secara maksimal untuk mengembangkan potensi warga fakir miskin.

Pemerintah Kota Bandung mempunyai program 800 KK untuk diberi pelatihan perubahan pola pikir dan diberi keterampilan. Sampai sekarang sudah ada kurang lebih 2000 orang yang ikut pelatihan perlindungan sosial untuk merubah mindset warga fakir miskin agar dapat hidup lebih berkembang dan mandiri. Berbagai upaya-upaya penanganan fakir miskin telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung, akan tetapi belum secara maksimal, karena dalam penanganannya ada ketidaksesuaian dengan Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah.

Pemerintah Dinas Sosial Kota Bandung menyatakan bahwa adanya usaha perlindungan untuk fakir miskin harus diupayakan dengan adanya pendampingan baik oleh pemerintah dengan melibatkan SKPD serta instansi terkait lainnya. Akan tetapi dalam

pelaksanaannya, Dinas Sosial Kota Bandung belum bisa melakukan pendampingan secara menyeluruh. Penerapan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan kebijakan Pemerintah yang telah dibuat.

B. Faktor-Faktor yang menjadi Penghambat Kebijakan Pemerintah Kota Bandung Dalam Upaya Penanganan fakir miskin.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat kebijakan Dinas Sosial Kota Bandung diantaranya:

- a. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kemampuan hidup masih rendah, sehingga tidak adanya keinginan yang kuat dalam diri setiap fakir miskin untuk hidup lebih berkembang dan mandiri, bahkan tidak sedikit masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah tetapi tidak mau mengakui sebagai fakir miskin, karena merasa malu untuk dikategorikan fakir miskin.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Kurangnya penegakan hukum dalam hal pendampingan dan pengawasan terhadap upaya penanganan fakir miskin, baik dalam hal pendataan fakir miskin maupun pengalokasian bantuan kepada fakir miskin, sehingga banyak bantuan-bantuan tidak tepat sasaran, seharusnya diberikan kepada warga yang tergolong fakir miskin akan tetapi diberikan kepada orang-orang yang masih tergolong mampu.

c. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Pergaulan hidup masyarakat kota Bandung saat ini dapat dikatakan kurang baik, karena banyak terdapat mulai dari anak sekolah dasar sampai anak remaja yang sudah merokok, berpacaran dan pergaulan bebas lainnya. Pergaulan bebas saat ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan pendampingan dari pihak keluarga dan orang tua. Para orang tua lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bekerja daripada berkumpul bersama anak-anaknya, untuk memberikan pengawasan dan pendampingan dalam mendidik anak, sehingga anak-anak merasa kurang diperhatikan oleh orang tua dan mengakibatkan pergaulan hidup yang bebas mengikuti arus lingkungan yang semakin tidak baik dan tidak sehat.

Struktur kehidupan bernegara, unit pertama yang dapat membentuk karakter seorang individu ialah keluarga. Keluarga menjadi lingkungan pertama yang dapat menentukan perilaku seseorang. Dapat dikatakan bahwa keluarga merupakan ajang pertama dalam membentuk konsep masyarakat sejahtera. Banyak keluarga yang belum menyadari bahwa lingkungan sosial dengan keluarga merupakan elemen yang saling terkait. Sehingga keluarga berada di tengah-tengah lingkungan sosial yang kemudian dipandang melalui banyak perspektif. Salah satu perspektif menganggap

keluarga yang tidak mampu memaksimalkan fungsinya sehingga pada akhirnya dianggap sebagai pemecah masalah dalam kehidupan bernegara. Kondisi keluarga atau orang tua yang telah mapan tentu akan membawa keturunan atau anak dalam kondisi berkecukupan. Namun sebaliknya, jika keluarga atau orang tua tidak mampu menyelesaikan masalah yang ada, maka akan turun kepada anaknya sehingga terjadi rantai kemiskinan.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah kota Bandung saat ini adalah faktor dari mindset masyarakat yang sudah terbiasa dengan meminta-minta bahkan dijadikan mata pencaharian dan tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk hidup lebih mapan dan berkembang sehingga Pemerintah cukup sulit untuk menanganinya. Pemerintah kota Bandung pun telah berupaya semaksimal mungkin untuk menangani permasalahan fakir miskin dengan memberikan program-program bantuan secara terpadu dan berkelanjutan. Akan tetapi kurangnya pengawasan dan pendampingan terhadap warga fakir miskin yang telah ditangani oleh Dinas Sosial menjadi kelemahan tersendiri bagi Pemerintah Kota Bandung, sehingga dari tahun ke tahun warga fakir miskin di Kota Bandung tidak mengurangi angka kemiskinan yang signifikan, maka Penerapan kebijakan pemerintah Kota Bandung terhadap penanganan fakir miskin dapat dikatakan belum cukup efektif, karena adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang diterapkan dengan penerapannya, yakni kurangnya pengawasan terhadap hal pendataan individu fakir miskin secara terperinci dan

kurangnya pendampingan secara maksimal yang mengakibatkan bertambahnya kembali angka kemiskinan di tahun 2018.

Warga miskin perlu diberikan pemahaman dan pemikiran yang kreatif, inovatif dan mandiri dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. Perlunya edukasi kepada seluruh masyarakat khususnya warga yang tergolong Fakir Miskin agar dapat terwujudnya kehidupan yang sejahtera.

Berdasarkan hasil temuan, peneliti mendapatkan informasi mengenai proses implementasi dan partisipasi masyarakat pada Program Keluarga Harapan Kota Bandung. Dengan menggabungkan dan mengkaji hasil temuan lapangan, observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dihubungkan dengan teori-teori yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Kemiskinan merupakan isu utama yang terus diupayakan penanggulangannya oleh pemerintah. Sebagai upaya penanganan fakir miskin tidak semata-mata tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, harus ada upaya terpadu dari semua pihak seperti keluarga, sekolah, perguruan tinggi, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pemerintah dengan bersatu padu mengadakan pelatihan secara konsisten untuk merubah pola pikir (*mindset*) masyarakat khususnya yang tergolong fakir miskin serta memberikan pengetahuan dan kesadaran akan hakikat hidup agar dapat hidup

lebih berkembang dan mandiri tanpa menunggu pemberian bantuan dari pemerintah demi terwujudnya kehidupan yang sejahtera.